Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia

Criminal Law Policy Regarding Tree Prohibition as a Campaign Props in Indonesia

Aras Firdaus & Qori Rizqiah H Kalingga*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Quality Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: recht_raz@yahoo.com

Diterima: Juli 2019; Disetujui: Oktober 2019; Dipublish: Oktober 2019

Abstrak

Pohon saat ini tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia karena suda merupakan bagian dari kelangsungan kehidupan tetapi sebagian manusia sendiri mengabaikan pohon sebagai mahluk hidup. saat pesta kampanye pemilihan umum berlangsung masing-masing pasangan calon yang ikut dalam pesta demokrasi tidak sedikit kita temukan pohon dijadikan alat peraga kampanye. Melalui instrumen kebijakan hukum pidana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan telah memberikan sanksi yang tegas. Demi keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun sebagian manusia mengabaikan sanksi hukuman pidana tersebut.. Sehingga perlindungan hukum terkhusus kepada pohon tersebut diperlukan aturan demi kelangsungan kehidupan dan masa depan manusia dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, tujuannya adalah memperoleh gambaran secara sistematis dan rinci untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. pengaturan dan perlindungan pohon secara hukum pada saat kampanye pemilihan umum hal ini diperlukan aturan khusus sesuai dengan hasil penelitian, sehingga dapat menimalisir kerusakan lingkungan. Penggunaan pohon sebagai alat peraga kampanye saat pemilihan umum sehingga aparat penegak hukum dan pemerintah terkait dapat melakukan tindakan hukum kepada para calon anggota legislatif dan eksekutif.

Kata Kunci: Hukum, Pohon, alat peraga kampanye

Abstract

Today trees are inseparable from human life because they are part of the continuity of life but some people themselves neglect trees as living things. when the election campaign party takes place each pair of candidates who take part in the party of democracy we can find a number of trees used as campaign props. Through the criminal law policy instruments contained in the legislation has given strict sanctions. For the sake of the balance of life between nature and humans for the protection and management of the environment, but some people ignore the sanctions of criminal sanctions .. So that the legal protection specifically for the tree rules applied for the continuity of life and the future of humans in the future. The method used in this research is normative juridical analytical descriptive, the aim is to obtain a systematic and detailed picture to answer the problem to be examined. the legal arrangement and protection of trees during the election campaign requires special rules according to the results of the study, so as to minimize environmental damage. The use of trees as campaign props during elections so that law enforcement officials and the relevant government can take legal action against candidates for legislative and executive members.

Keywords: Laws, Trees, campaign props

How to Cite: Firdaus, A & Qori Rizqiah H Kalingga (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Larang Pohon Sebagai Alat Peraga Kampaye di Indonesia. *Doktrina: Journal of Law*. 2 (2): 164-172

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah segala benda dan keadaan yang terdapat dalam suatu tempat makhluk hidup yang mempengaruhi hidupnya. Permasalahan lingkungan hidup menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi Indonesia. Meski sering terjadi, permasalahan ini dianggap tidak penting dibandingkan permasalahan lainnya. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang tidak disadari masyarakat Indonesia ialah adanya penggunaan pohon yang digunakan alat atribut kampanye dalam pemilu. Pemilu sebagai sarana dan prasarana pencapaian untuk kedaulatan rakyat dan juga merupakan arena persaingan yang paling adil bagi partai politik.

Partai politik sebagai kandidat pemilu dinilai secara akuntabilitas setiap 5 tahun oleh rakyat dengan secara jujur dan adil (Sukriono, 2009). Namun pada saat pemilu calon legislatif dan eksekutif mengkampanyekan dirinya melalui spanduk yang digantungkan pada pohon. Hal tersebut merupakan pelanggaran pemilihan umum yang diatur didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang

untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik, dengan memberikan sanksi pidana yang cukup berat dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Kim, 2013).

Selain itu penggunaan pohon sebagai alat atribut kampanye juga dapat mengganggu estetika lingkungan. Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu dibutuhkan manusia (Rezeki, 2014).

Sehingga manusia dalam hal ini para calon tersebut seharusnya tidak hanya diberikan hukuman sanksi administrasi tapi juga hukuman pidana bagi mereka agar pohon sebagai paru-paru bumi tetap terjaga. Penggunaan paku, sekrup menyebabkan gangguan fisiologi dan morfologi pohon jika tidak dipasang dengan benar. Bentangan tali dan kabel yang bergantung di cabang-cabang dan ranting pepohonan sangat merusak sehingga akibatnya dapat merusak kulit pada pohon-pohon dan struktur tumbuhan. Kerusakan yang lainnya terdapat di kulit pohon-pohon, disebabkan oleh paku atau baut sebagai titik masuk potensial terjadinya infeksi penyakit dan bakteri. Tusukan inilah yang

akan terjadinya kerusakan kompartementalisasi.

Penyebab maraknya kejahatan lingkungan hidup salah satunya ialah kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak memihak kepentingan lingkungan serta belum adanya kesamaan persepsi diantara penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan (Bawono, dkk, 2011). Menegakkan hukum lingkungan merupakan salah satu cara untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan dalam ketetapan hukum yang berlaku secara individu dan umum, melalui pengawasan dan penggunaan sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan (Syapriallah, 2016).

Maka penegakan hukum pidana diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan norma dan nilai hukum agar dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya pepohonan. Sesuai dengan uraian tersebut diatas tentunya ada beberapa masalah yang perlu dikaji dan dianalisis guna memecahkan masalah hukum yang berkenaan sistem pertanggungjawaban hukum pidana dalam lingkungan hidup dan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup serta regulasi aturan kebijakan hukum pidana mengenai larangan pepohonan sebagai alat atribut kampanye di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah pada penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang dijadikan sebagai acuan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian pada hukum doktriner atau normatif yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data dengan cara penelitian bahan pustaka yang ada atau yang disebut dengan sekunder.

Sifat penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu bentuk penelitian yang dikhususkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena secara alamiah maupun fenomena ciptaan manusia. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian berusaha menginterpretasikan dan mendeskripsikan sesuatu, misalnya keadaan atau keterkaitan yang ada, proses yang sedang berlangsung, pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pidana dalam Lingkungan Hidup

Hukum Pidana mengharuskan ada 3 (tiga) dalam rangka pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang secara konseptual menurut Sauer sebagai trias dalam Hukum Pidana. Menurut Barda Nawawi Arief menyampaikan sebagai 3 (tiga) persoalan dasar dalam hukum pidana, yaitu: konsep Perbuatan (P), konsep Orang (O), dan konsep Pidana (P), yang disingkat POP. (Basuki, 2011). Maka *criminal act* adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Lebih lanjut Moeljatno menegaskan, *criminal act* tersebut dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Untuk adanya *criminal act* haruslah diatur terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dalam suatu peraturan perundangundangan. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, selain seseorang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Maksim yang terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana ialah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana (*actus reus*), akan tetapi harus ada kesalahan (*mens rea*) atau sikap batin yang dapat dicela. Bentuk kesalahan dalam ilmu hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni suatu perbuatan yang dilandasi dengan kesengajaan dan kealpaan.

Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang memenuhi unsur-unsur delik lingkungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Delik lingkungan adalah larangan dan perintah undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain denda dan pemenjaraan, dengan maksud untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, udara, air dan lahan serta manusia. (Rahmadi, 2012).

Maka agar sistem hukum pertanggungjawaban lingkungan hidup tersebut berjalan dengan baik. Aparat penegak hukum yang menjalankan

amanat undang-undang juga memiliki pengetahuan hukum yang baik dan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) (Silalahi, 1994). Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, *supervise*, penerangan dan nasihat, sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana (Dewi, 2012).

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam bernegara dan kehidupan bermasyarakat dengan proses-proses dilakukannya upaya penegakan hukum. Penegakan

hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang umum dan dapat pula diartikan sebagai usaha penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang melakukan sesuatu atau menjalankan aturan normatif atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti diartikan dia sudah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum diartikan sebagai usaha aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Kartono, 2009).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup ditujukan kepada pelaku kejahatan. Aparat penegak hukum akan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Kitab Hukum Acara Pidana kecuali apabila ditentukan lain dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang

lain yang meliputi dari lingkungan hidup untuk mengumpulkan alat bukti dari kejahatan tersebut. Setelah terbukti melakukan kejahatan lingkungan hidup maka si pelaku akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan diadili dimuka persidangan oleh para hakim.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut yaitu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah pelaku dijatuhkan hukuman maka selanjutnya pelaku akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan oleh hakim. Harapan dari hukuman tersebut agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama dan bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai contoh agar tidak melakukan hal tersebut.

Peraturan yang tercakup dalam perundang-undangan selain UUPH dan KUHP dapat juga ditemukan kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, kecermatan para

penyidik, penuntut umum dan hakim serta penegak hukum yang terkait lainnya sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada prinsipnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup (Wahid, 2011). Permasalahan Lingkungan hidup saat ini sangat menarik dikaji secara mendalam karena merupakan persoalan yang kompleks mengenai kebijakan pidana yang terdapat dalam upayanya untuk usaha menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik fokus penulis yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengkaji Undang-undang No. 32 Tahun 2009 secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*) (Kim, 2013).

Regulasi Aturan Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia

Kebijakan pidana Marc Ancel pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen, yaitu *criminology*, *penal policy* dan *criminal law*. Marc Ancel menyampaikan bahwa *penal policy* merupakan seni atau ilmu yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi petunjuk kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Istilah kebijakan dalam penelitian ini diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris. Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah lain dari hukum pidana dapat pula disebut sebagai *penal policy*. (Arief, 2005).

Kebijakan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan menjadi kerangka dan konsep dasar harmonisasi sistem hukum nasional dengan meletakkan pola pikir, yakni bermula dari

paradigma Pancasila bersama-sama dengan konsep negara hukum dan prinsip pemerintahan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memperhatikan rasa keadilan masyarakat (*social sense of justice*) dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat mengenai pelarangan pohon sebagai alat peraga diperlukan agar setiap manusia memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk mencapai kehidupan yang aman dan damai (Budoyo, 2014).

Agar manusia dapat mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran dalam berkehidupan sehari-hari. Akan tetapi manusia kerap kali melanggar aturan demi kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga perbuatan yang dilakukan bukan hanya merugikan orang lain tetapi lingkungan. Kehidupan manusia sudah berdampingan dengan pohon.

Pohon adalah makhluk hidup yang selalu menemani kehidupan manusia, pohon juga memberikan oksigen untuk manusia dan makhluk hidup disekitarnya. Pohon seringkali dianggap sebelah mata oleh sebagian manusia sehingga pohon

selalu teraniaya oleh perbuatan manusia. Kejadian penganiayaan terhadap pohon dapat dilihat pada saat pesta demokrasi berlangsung dimana pohon selalu menjadi korban dari aksi kampanye oleh calon legislatif dan eksekutif. Sehingga pohon tidak produktif untuk hidup dan menghasilkan oksigen. Akibatnya pohon tidak mampu menyerap udara kotor disekitar.

Seharusnya para calon legislatif dan eksekutif tidak menjadikan pohon sebagai alat atribut kampanye merupakan bagian dari pelanggaran dalam pemilihan umum yang diatur didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 yang mencakup pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Mengenai Penataan Ruang, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 Mengenai Kampanye Pemilihan Umum. Pemberian hukuman bukan hanya diberikan sanksi administrasi atau sanksi teguran. Namun perlunya hukuman penjara agar memberikan efek jera dan memberikan contoh pada para calon legislatif dan eksekutif yang lain untuk

tidak melakukan hal yang sama. Pemerintah harus memprioritaskan lingkungan hidup dalam peraturan tentang pemilihan umum bukan hanya memfokuskan mengenai isu money politik dan isu hukum yang saat ini berkembang terkait kampanye dan pemilihan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat ditarik simpulan bahwa kebijakan hukum pidana lingkungan hidup melalui peraturan perundang-undangan mengenai pelarangan pohon sebagai alat peraga kampanye pada saat pemilihan umum di Indonesia. Secara normatif belum diatur secara khusus. Sehingga pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU dan badan pengawas pemilihan umum membentuk peraturan mengenai larangan pohon sebagai alat peraga kampanye, karena hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini dilakukan agar ke depan para kandidat anggota legislatif dan eksekutif tidak menggunakan pohon sebagai alat atau media dalam berkampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, N. B, (2005), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, S., (2010), *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18 (1)
- Basuki, A., (2011), *Pertanggung Jawab Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan*, *Perspektif*.XVI (4).
- Bawono, Tri Bambang., Mashdurohatun Anis, (2011), *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang illegal logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula*, 24 (2).
- Budoyo, (2014), *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan*, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, IV (2).
- Dewi, S. A. D, (2012), *Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat*, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang*. 1 (1).
- Kartono, (2009), *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3)
- Kim So Woong, (2013), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum lingkungan Hidup*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3).
- Rahmadi, T., (2012), *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rezeki, S. S, (2014).*Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU RI No. 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam*, Digital Library UIN Sunan Ampel.
- Silalahi, D., (1994), *Manusia Kesehatan dan Lingkungan*, *Jurnal MasalahLingkungan Hidup*. Mahkamah Agung.1.
- Siombo, R. M., (2011), *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3).
- Sofyan, A., & Azisa Nur, (2016), *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Pena Press.
- Suartha, M. D. I, (2015), *Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 4 (1).
- Sukriono, D., (2009), *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, 1(1).
- Syapriallah, A., (2016), *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 1(1).
- Wahid, Y. M, (2011), *Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan*, *Jurnal Ilmiah Ishlah*, 13 (02).